

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem agribisnis, keterkaitan antara subsistem dapat berjalan apabila terdapat hubungan yang saling menguntungkan secara proporsional dan saling mendukung antar pelaku dalam sistem komoditas bersangkutan. Keterkaitan yang saling menguntungkan secara proporsional tersebut merupakan fondasi yang kuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kebutuhan para pelaku dalam sistem agribisnis (Sa'id dan Intan, 2001).

Keunggulan sektor pertanian adalah dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan sektor-sektor lainnya disebabkan sektor pertanian merupakan kegiatan usaha yang padat karya. Menurut Salvatore and Dowling (1997) dalam Adrimas (2012) menyatakan bahwa peranan penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut.

- 1) Sebagai sektor yang paling banyak memperkerjakan pekerja, maka sektor pertanian merupakan sumber *man-power* bagi industrialisasi. Peningkatan produktivitas pertanian memungkinkan para pekerja untuk keluar dari sektor pertanian dan masuk ke sektor industri tanpa menimbulkan gangguan terhadap suplai pangan.
- 2) Sebagai sektor pemasok pangan dan bahan mentah yang diperlukan oleh sektor industri dan para pekerjanya di kota. Hal ini dikarenakan jika sektor pertanian diabaikan (ketersediaan pangan untuk konsumsi) maka akan mempengaruhi produktivitas dari industri itu sendiri disamping kebutuhan ketersediaan bahan mentah untuk bahan industri.
- 3) Pada tahap awal pembangunan, sektor industri memerlukan devisa untuk mengimpor mesin - mesin dan bahan mentah yang tidak dapat dihasilkan sendiri di dalam negeri. Karena produk primer merupakan sumber penerimaan ekspor yang penting di negara terbelakang, sektor pertanian harus menyediakan jasa yang vital ini.

- 4) Suatu program pembangunan atau industrialisasi memerlukan sejumlah investasi. Karena sebagian besar pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian, maka sektor ini harus menjadi sumber *saving* yang utama.
- 5) Sektor industri tidak dapat berfungsi secara efisien atau bertambah luas menjadi kekuatan yang dapat bersaing tanpa adanya pasar berskala besar. Maka dalam hal ini sektor pertanian menyediakan pasar yang diperlukan oleh sektor industri itu.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam membangun sektor pertanian adalah dengan penetapan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009 yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di pedesaan melalui penyusunan prioritas dan arah kebijakan pembangunan berupa Penanggulangan Kemiskinan dan Revitalisasi Pertanian. Salah satu bentuknya pada tahun 2010 Kementerian Pertanian telah menyalurkan dana bantuan sosial dalam bentuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di 8.587 desa/ Gapoktan di 444 Kabupaten/ Kota pada 33 Provinsi seluruh Indonesiayang masing-masing nya menerima dana sebesar Rp.100.000.000,-. Gapoktan penerima dana PUAP diharapkan dapat mengelola dana PUAP melalui unit usaha otonom simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro. Penyaluran dana bantuan sosial dalam bentuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sampai dengan Agustus 2011 sudah mencapai Rp 2,89 triliun (Simangunsong, 2016).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang dicerminkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hampir setiap tahun mengalami pertumbuhan. PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 berdasarkan harga konstan 2010 mengalami peningkatan 5.9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berada pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dimana pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 25.04% dibandingkan tahun sebelumnya 24.7%. kemudian disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 15.4% (BPS Prov. Sumatera Barat, 2015).

Sektor pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian merupakan lapangan kerja utama bagi sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Barat. Sub lapangan usaha tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu tercatat sebesar 30,22% pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 29,27% . Jumlah rumah tangga yang bermata pencaharian di sektor pertanian dalam berjumlah 644.610 rumah tangga dan 9,1% berusaha pada subsektor kehutanan, 9,8% berusaha di subsektor perikanan dan 7,7% sebagai buruh tani. Nilai tukar petani mengalami penurunan menjadi -0,93% dari kondisi Mei 2015 94,79% menjadi 93,91% di bulan Juni 2015. Indeks yang diterima petani padi mengalami penurunan 0,34% dari kondisi Mei 2015 112,58 menjadi 112,20 di bulan Juni 2015 (BPS Prov. Sumatera Barat, 2015).

Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka prioritas pembangunan Sumatera Barat diarahkan pada Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sektor tersebut. Menyikapi hal tersebut Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan landasan hukum untuk melaksanakan Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) dalam bentuk Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 520 – 330 – 2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Pensejahteraan Petani Provinsi Sumatera Barat yang berisikan SKPD terkait yang ikut serta dalam mensukseskan program. Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Barat tertanggal 9 November 2011 nomor : 521.1/1098/Sekr-GPP/2011 perihal percepatan pencapaian sasaran Program GPP tahun 2012, telah diberikan arahan agar seluruh SKPD terkait memfokuskan kegiatan-kegiatan yang mendukung Program GPP dan cocok ditempatkan pada lokasi GPP dengan program/kegiatan yang ada pada SKPD baik yang didanai dari APBN (Pusat) maupun APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Tujuannya adalah agar jumlah usaha petani bertambah sesuai potensi sumberdaya pertanian yang tersedia dan jam kerja efektif petani meningkat melalui pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani sebagai penerima kegiatan.

Sasaran akhir Program GPP adalah meningkatnya pendapatan rumah tangga petani (RTP) secara bertahap melalui pemberdayaan masyarakat menuju kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik dengan keberlanjutan usaha dan berkembang menjadi kata kunci kesuksesan Program GPP

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020, dinyatakan bahwa sektor pertanian memang bukan sebagai sektor unggulan karena kota dicirikan oleh ekonomi berbasis non pertanian. Namun untuk daerah yang mengalami keterbatasan kegiatan ekonomi pada strata sekunder dan tersier, sektor pertanian merupakan pilihan. Pengembangan sektor pertanian pada RPJP Kota Padang menitikberatkan pada peningkatan keunggulan dan daya saing melalui perluasan basis usaha pertanian secara intensif melalui pertanian perkotaan (*urban farming*) berteknologi tinggi dengan sasaran 3 kecamatan yaitu Kuranji, Koto Tangah dan Pauh sebagai daerah penghasil komoditas pertanian dan keunggulan relatif ketiga daerah ini di sektor pertanian perlu dipacu perkembangannya.

Pada Tahun 2013 tingkat pertumbuhan PDRB pada tahun 2013 sebesar 6,45% yaitu dari 13.637,36 milyar rupiah pada tahun 2012 menjadi 14.516,70 milyar rupiah pada tahun 2013 atau secara nominal naik sebesar 879,34 milyar rupiah.. Walaupun begitu jika dilihat dari kontribusi distribusi persentase PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, lapangan usaha pertanian mengalami penurunan persentase mulai 5,87% (tahun 2011), 5,78% (tahun 2012) dan 5,7% pada tahun 2013 (BPS Kota Padang, 2014). Kenyataan ini seiring dengan penggunaan lahan sawah di perkotaan di Provinsi Sumatera Barat mengalami pengurangan setiap tahunnya dikarenakan pembangunan infrastruktur, pemukiman dan lain-lain. Pada kondisi tahun 2012 terjadi penurunan lahan sawah di Kota Padang menjadi 35,44 Ha. Hal ini juga terlihat dari kondisi tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 berjumlah 6.917 Ha menjadi 6.623 Ha pada tahun 2011 (Lampiran 1.1). Dari laporan hasil sensus pertanian oleh BPS Kota Padang tahun 2013, kondisi jumlah rumah tangga jasa pertanian masih didominasi oleh sektor tanaman pangan berjumlah 649 rumah tangga dari total 882 rumah tangga jasa pertanian. Salah satu kebijakan umum adalah pengembangan kelompok

masyarakat peduli sebagai bentuk mediasi dalam partisipasi publik terhadap program yang memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan dan berfokus pada sektor pertanian.

Pemerintah Kota Padang menyambut Program GPP yang menjadikan sasaran rumah tangga petani melakukan kegiatan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Pemenuhan syarat telah menerima dana PUAP (Lampiran 1.2) menjadikan Kota Padang ikut untuk mensukseskan Program GPP dikarenakan juga selaras dengan RPJMD Kota Padang dalam pensejahteraan petani. Untuk wilayah perkotaan dari 7 Pemerintahan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang merupakan *pilot project* pelaksana Program GPP dengan jumlah pelaksana terbanyak sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 dengan total kelompok tani 28 kelompok tani yang tersebar di 12 Kelurahan pada 8 Kecamatan yang menjadi sasaran untuk melaksanakan program di Kota Padang (Lampiran 1.3).

Namun dari laporan Sekretariat GPP, jumlah kelompok pelaksana yang selalu bertambah setiap tahunnya dengan fasilitasi kegiatan dari salah satunya dari distribusi pendapatan kondisi 2014 per bulan rata-rata berjumlah Rp. 1.437.232,- dan jauh dari target pendapatan sasaran Rp.2.000.000/bulan. Indikasi masalah pemberdayaan dari kelompok tani menjadi perlu ditelusuri dalam melaksanakan kegiatan sehingga kebijakan Program GPP oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dipandang perlu untuk ditelaah guna membantu efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, mengetahui tingkat keberhasilan, kendala yang dihadapi serta keberlanjutan implementasi program pada tahun berikutnya.

Indikasi awal bahwa Program GPP di Kota Padang sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan petani perlu di analisa dari sisi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan serta prioritas dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan persoalan diatas maka penulis merasa perlu melakukan kajian dengan judul “*Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Petani di Kota Padang*”.

B. Perumusan Masalah

Pengurangan lahan pertanian sebagai input utama berusaha tani di Kota Padang berdampak juga pada lapangan pekerjaan di bidang pertanian dimana

tempat berusaha semakin lama semakin menyusut seiring dengan perkembangan kota. Sebagaimana dinyatakan Sajogyo (2003) bahwa permasalahan struktural petani tersebut disebabkan oleh kebijakan yang tidak memihak petani. Kebijakan ini merupakan kesalahan strategi pembangunan, yang harus diubah dengan memberikan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya domestik pada petani dan masyarakat secara berkeadilan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Penempatan kegiatan-kegiatan SKPD pada kelompok tani pelaksana yang tersebar tersebut belum nampak secara riil apakah dengan pelaksanaan program ini mampu untuk memberdayakan masyarakat yang dalam hal ini adalah anggota kelompok tani. Karena dari beberapa laporan dan pemantauan sebelumnya ada beberapa kegiatan yang tidak berkembang karena kurangnya pemberdayaan anggota yang bisa terjadi karena SDM, faktor manajerial kelompok atau lainnya.

Untuk penelitian ini memunculkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat (kelompok tani sasaran) dalam pelaksanaan program Gerakan Pensejahteraan Petani di Kota Padang?
- 2) Apa prioritas strategi kebijakan untuk pelaksanaan program Gerakan Pensejahteraan Petani Kota Padang di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Petani di Kota Padang
- 2) Membuat prioritas strategi kebijakan untuk pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Petani di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

- 1) Dari sisi metodologi guna memberikan informasi empiris kepada pihak terkait mengenai dampak pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Petani dari sisi pemberdayaan masyarakat
- 2) Dari sisi teoritis adalah sebagai kontribusi sumbangan pemikiran kritis terhadap program dan kebijakan pembangunan pertanian melalui program tersebut khususnya untuk wilayah perkotaan.

- 3) Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi sumbangan untuk pengembangan program Gerakan Pensejahteraan Petani oleh pihak terkait dalam hal ini Pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta *stake-holder* lain .

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada pelaksanaan Program GPP dana pencapaian pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani penerima program Gerakan Pensejahteraan Petani di Kota Padang. Dari data yang diperoleh, pelaksanaan di Kota Padang mulai dari tahun 2011-2014 terdiri dari sebanyak 28 kelompok tani. Dari semua kelompok tersebut tersebar di 8 kecamatan. Kelompok yang menjadi pelaksana merupakan kelompok tani yang sudah eksis pada masing-masing kelurahan dengan setiap kelompok tani dibatasi dalam pengelolaan kegiatan dalam Program GPP yakni terdiri dari 20 anggota. Pemilihan Kota Padang selain *pilot project* dari GPP dilihat dari jumlah pelaksana terbesar di Kota dan permasalahan awal yang telah disampaikan sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran mengenai isi tesis serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan perumusan masalah, maka tesis ini disusun dengan sistematika penulisan tesis sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi berbagai tinjauan literatur yang mendukung penelitian, teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang data, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan pada penelitian.

BAB IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian secara umum mengenai objek penelitian yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan, menerangkan dan membahas tentang hasil analisis data yang diperoleh serta implikasi kebijakan pelaksanaan Program GPP di Kota Padang.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab kesimpulan dan saran menjelaskan secara singkat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

